



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/108/ /TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PULUH SATU STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, telah ditetapkan perpanjangan ketiga puluh status tanggap darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/674/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Ketiga Puluh Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan kegiatan pemeriksaan swab di rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya dan pemeriksaan swab PCR mandiri yang dilakukan oleh masyarakat masih terus dilaporkan adanya kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga masih terus diperlukan adanya peningkatan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan dengan lebih *massive* dan bervariasi secara terus menerus dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan COVID-19 serta mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 untuk mewujudkan *herd immunity*;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan status Keadaan Darurat Bencana tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Ketiga Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Ketiga Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEDUA : Selama masa tanggap darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan Pembatasan Kegiatan Sosial/Kemasyarakatan dan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara tegas dan ketat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Perangkat Daerah terkait fungsional/teknis pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sesuai kewenangannya mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diformulasikan menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 NOV 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN